

**IMPLEMENTASI SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI DALAM  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN  
HIDUP KABUPATEN KEDIRI**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi  
Pada Program Studi Akuntansi



OLEH :

**YAYANG ERIKA AMANDANI**

NPM: 19.1.02.01.0017

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

**2023**

Skripsi Oleh :

**YAYANG ERIKA AMANDANI**  
NPM: 19.1.02.01.0017

Judul:

**IMPLEMENTASI SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI DALAM  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN  
HIDUP KABUPATEN KEDIRI**

Telah disetujui untuk diajukan Kepada  
Panitia Ujian/Sidang Skripsi Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Nusantara PGRI Kediri

Tanggal: \_\_\_\_\_

Pembimbing I



**MAR'ATUS SOLIKAH, M.Ak.**  
NIDN. 0709047405

Pembimbing II



**HESTIN SRI WIDIAWATI, M.Si**  
NIDN. 0708037605

Skripsi Oleh :

**YAYANG ERIKA AMANDANI**  
NPM: 19.1.02.01.0017

Judul:

**IMPLEMENTASI SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI DALAM  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN  
HIDUP KABUPATEN KEDIRI**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian/Sidang Skripsi  
Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNP Kediri  
Pada tanggal: \_\_\_\_\_

**Dan Dinyatakan telah Memenuhi Persyaratan**

Panitia Penguji:

1. Ketua : Mar'atus Solikah, M.Ak
2. Penguji I : Dr. Faisol, M.M.
3. Penguji II : Hestin Sri Widiawati, M.Si



Mengetahui,  
Dekan FEB



**Dr. Subagyo, M.M**  
NIDN. 0717066601

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : Yayang Erika Amandani  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/ tgl. lahir : Kediri/ 5 Januari 2000  
NPM : 19.1.02.01.0017  
Fak : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya tulis atau pendapat yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara sengaja dan tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Kediri, 20 Juli 2023

Yang Menyatakan



**Yayang Erika Amandani**

NPM: 19.1.02.01.0017

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya

*(Qs. Al-Baqarah : 286)*

Maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan

*(Qs. Al- Insyirah : 5)*

Kesuksesan dan kebahagiaan terletak pada diri sendiri. Tetaplah berbahagia karena kebahagiaanmu dan kamu yang akan membentuk karakter kuat untuk melawan kesulitan.

*(Hellen Keller)*

Kupersembahkan karya ini buat:

Orangtua, terimakasih telah berjuang untuk kehidupan saya berkat doa dan dukungannya saya bisa berada di titik ini, serta keluarga terimakasih telah

mendukung dan menjadi support sistem saya selama ini

Diri saya sendiri, terimakasih telah sabar, kuat, dan terus berjuang hingga detik ini

Sahabat saya, terimakasih sudah memberi saya semangat dan dukungan

Orang baik di sekitar saya, terimakasih sudah memberi saya motivasi

## **Abstrak**

**Yayang Erika Amandani** : Implementasi Sistem Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri, Skripsi, Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2023.

Kata Kunci : Sistem Transaksi Non Tunai, Pengelolaan Keuangan Daerah

Implementasi sistem transaksi non tunai ini merupakan upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya korupsi dan penyelewengan dana. Hal ini dilakukan agar meningkatkan transparansi pada pengelolaan keuangan daerah pada setiap instansi di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui proses implementasi sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri (2) dan apa keuntungan dan kendala implementasi sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri. Pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif sedangkan untuk jenis penelitiannya dilakukan dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dalam prosedur pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan temuannya menggunakan triangulasi sumber. Hal ini bertujuan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data yang diperoleh dari berbagai sumber. Kesimpulan hasil penelitian ini membuktikan bahwa implementasi sistem transaksi non tunai dalam penerimaan daerah masih belum sesuai dengan teori dan bertahap menuju sistem transaksi non tunai, sedangkan implementasi sistem transaksi non tunai dalam pengeluaran daerah sudah sesuai dengan teori. Implementasi sistem transaksi non tunai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri bisa dikatakan cukup baik.

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur Kami panjatkan kehadirat Allah Tuhan Maha Kuasa, karena hanya atas perkenan-Nya penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi dengan judul “Implementasi Sistem Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri” ini ditulis guna sebagai memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan, bimbingan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini diucapkan terimakasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Dr. Zainal Afandi, M.Pd. selaku Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri yang selalu memberikan dorongan motivasi kepada mahasiswa
2. Dr. Subagyo, M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri
3. Sigit Puji Winarko, S.E., S.Pd., M.Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Nusantara PGRI Kediri
4. Mar’atus Solikah, M.Ak. selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, arahan, dan saran kepada penulis

5. Hestin Sri Widiawati, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, arahan, dan saran kepada penulis
6. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri yang telah memberikan data penelitian yang diperlukan untuk penyelesaian skripsi ini
7. Orang tua yang saya cintai yaitu Bapak Sumaji dan Ibu Khoirun Nisaak serta Kakak Keponakan yang saya cintai Febrina Dwi Nurcahyanti dan seluruh keluarga besar yang telah memberi doa serta dukungan penuh sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
8. Sahabat saya Finda Qurofia'yun dan Qurrotul Ain yang senantiasa mendengarkan keluh kesah penulis, memberi dukungan, dan pengingat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik
9. Teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberi banyak dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

Disadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, maka diharapkan masukan, kritik, dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat dijadikan acuan tindak lanjut penelitian selanjutnya dan bermanfaat bagi kita semua terutama bagi ilmu akuntansi.

Kediri, Juli 2023

**YAYANG ERIKA AMANDANI**  
NPM: 19.1.02.01.0017



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II : LANDASAN TEORI.....</b>	<b>8</b>
A. Kajian Teori .....	8
1. Akuntansi Pemerintahan.....	8
2. Pengelolaan Keuangan Daerah.....	9
3. Sistem Transaksi Non Tunai .....	13
4. Implementasi Sistem Transaksi Non Tunai Pemerintah Daerah .....	14
5. Langkah dan Strategi Implementasi Non Tunai Pemerintah.....	16
B. Penelitian Terdahulu .....	17
C. Kerangka Berpikir .....	22

<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>24</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	24
B. Kehadiran Peneliti .....	25
C. Situs Penelitian .....	25
D. Tahapan Penelitian .....	26
E. Sumber Data dan Teknik Pemilihan Informan .....	27
F. Prosedur Pengumpulan Data .....	29
G. Teknik Analisis Data .....	30
H. Uji Keabsahan Temuan .....	32
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
A. Gambaran Umum Informan dan Diskripsi Situs Penelitian ...	34
B. Diskripsi Data Hasil Penelitian .....	42
C. Interpretasi dan Pembahasan .....	49
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
A. Temuan .....	57
B. Implikasi .....	58
C. Rekomendasi .....	59
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>60</b>
<b>Lampiran.....</b>	<b>62</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian.....	28
Tabel 4.1 Hasil Triangulasi Sumber.....	47
Tabel 4.2 Perbandingan Perbup No. 23 Tahun 2021 dengan Dinas (Penerimaan Daerah) .....	50
Tabel 4.3 Perbandingan Perbup No. 23 Tahun 2021 dengan Dinas (Penerimaan Daerah) .....	51

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....	23
Gambar 4.1 Bagan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri.....	42
Gambar 4.2 <i>Flowchart</i> Penerimaan Daerah.....	43
Gambar 4.3 <i>Flowchart</i> Pengeluaran Daerah.....	45

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. : Hasil Wawancara dan Lampiran Foto
2. : Rekap Wajib Retribusi Bulanan
3. : Surat Tanda Setoran
4. : Buku Harian Setoran
5. : Rekap Pengajuan Belanja TNT
6. : Nota Debet TNT
7. : Surat Izin Penelitian
8. : Surat Keterangan Penelitian (Dinas)

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Saat ini munculnya isu otonomi daerah di Indonesia yang memberi kesempatan pada pemerintah daerah dalam merancang dan menentukan pelayanan kepada publik yang terletak pada tata kelola keuangan daerah guna menciptakan *good governance* dalam menciptakan pemerintahan yang sehat dan bersih demi kesejahteraan masyarakat. Setiap pegawai suatu pemerintah juga memiliki peran dalam mewujudkan peraturan pemerintahan yang baik. Akuntansi pemerintahan sebagai bidang ilmu pengetahuan tentang cara pengelolaan keuangan yang dapat memberikan informasi kepada pihak tentang pelaksanaan kegiatan ekonomi oleh pemerintah itu sendiri. Akuntansi pemerintahan mengkhususkan pencatatan dan pelaporan atas transaksi-transaksi yang terjadi pada badan pemerintah. Perbedaan antara organisasi non-profit dengan organisasi profit adalah dalam tujuannya. Akuntansi pemerintahan menyediakan laporan keuangan yang bermanfaat mengenai aspek kepengurusan dan administrasi keuangan negara serta membantu mengadakan kontrol atas pengeluaran meliputi Anggaran Negara agar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Pengelolaan keuangan daerah yang baik ditandai dengan meningkatnya kemandirian daerah, adanya prinsip akuntabilitas dan transparansi publik, sehingga pengelolaan uang yang akan

dibelanjakan dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Dalam prosesnya melalui pelaporan keuangan yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat, guna melihat apakah sejauh ini tingkat pemakaian anggaran daerah sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan pemerintah. Sehingga tidak akan ada asumsi masyarakat tentang penyelewengan anggaran daerah. Pengelolaan keuangan daerah itu merupakan “Pengelolaan keuangan daerah meliputi seluruh kegiatan seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah” (Baldrick, 2015). Berbagai kebijakan diperbaharui oleh pemerintah guna menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik, salah satunya adanya implementasi transaksi non tunai.

Implementasi sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menghindari praktek korupsi serta upaya pemerintah dalam meningkatkan transparansi pada setiap transaksi dan menghindari penyelewengan pada penggunaan anggaran daerah. Di Indonesia sering sekali terjadi kasus korupsi dalam tingkatan pejabat tinggi maupun aparatur pemerintah. anggaran dana yang memiliki nominal besar tentu sesuatu hal yang sangat menggiurkan bagi seseorang yang ingin melakukan penyelewengan dana dan yang berujung tindakan korupsi. Hal ini tertera pada Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Kemendagri mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri pada tanggal 17 April 2017 Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi

Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dilanjutkan oleh Kabupaten Kediri pada tanggal 3 Maret 2021 Nomor 900/1100/418.51/2021 Nota Dinas dari Plt.Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri menetapkan pelaksanaan Transaksi Non Tunai secara bertahap yang meliputi transaksi penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah.

Sistem transaksi non tunai dilakukan tanpa menerima atau menggunakan uang secara fisik, tetapi melalui transfer informasi antara pihak-pihak yang terkait baik dalam transaksi jasa maupun barang. Selain itu juga dianggap lebih praktis dan efisien bahkan dapat mendukung perekonomian melalui tingkat ketepatan peredaran uang. Transaksi non tunai memang penerapannya paling mudah dan efisien, namun bisa memiliki hambatan seperti sistem aplikasi keuangan dan jaringan teknologi yang kurang maksimal sehingga membutuhkan pembaharuan yang mungkin bisa menghambat sebuah transaksi.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adam Dkk (2021) menyatakan bahwa dengan adanya sistem transaksi non tunai dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah, dengan didukung sistem informasi yang terintegrasi akan mencatat transaksi secara tepat dan akurat Adapun penelitian yang dilakukan oleh Lailatur dan Dian (2022) menyatakan bahwa sistem transaksi non tunai sebagai dasar tata kelola keuangan pemerintahan segala jenis transfer dapat dipantau secara *real time* guna



kepentingan kesesuaian antara pelaporan buku kas umum dengan laporan rekening bank.

Salah satu faktor yang menghambat penerapan transaksi non tunai yaitu kurangnya regulasi instruksi dari pemerintah tentang transaksi non tunai tidak disosialisasikan dengan maksimal yang membuat pemahaman tentang pentingnya penerapan transaksi non tunai dalam meningkatkan tata kelola keuangan yang baik dan transparan masih kurang. Terdapat pihak ketiga atau pihak penyedia barang atau jasa yang belum memiliki rekening daerah yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, hal tersebut yang menimbulkan kesulitan dalam proses implementasi sistem transaksi non tunai dalam pelaksanaan penerimaan maupun belanja daerah. Sehingga kualitas sumber daya relatif belum memadai secara penuh dalam tuntutan pekerjaan yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sedangkan menurut penelitian dari Hariyono (2020) menunjukkan hasil bahwa penerapan transaksi non tunai pada pemerintah daerah kabupaten landak masih memiliki kendala pada kesiapan sumber daya manusianya, selain itu infrastruktur yang kurang memadai seperti masih ada beberapa bendahara penerimaan pada pemerintah daerah yang menyetorkan pendapatan secara tunai karena tidak adanya kantor cabang pembantu bank kalbar. Kemudian ketersediaan sinyal yang kurang memadai menyebabkan pendapatan yang seharusnya disetor ke kas daerah maksimal 24 jam menjadi lebih dari 24 jam. Sehingga proses penerapan transaksi non tunai tidak berjalan secara efisien dan aman.

Dalam memaksimalkan penerapan transaksi non tunai, pemerintah Kabupaten Kediri terus melakukan upaya pengembangan dengan melakukan sosialisasi penerapan transaksi non tunai terhadap semua pihak yang terkait. Salah satu perangkat daerah di Kabupaten Kediri yang sudah mulai menerapkan transaksi non tunai ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri. Kebijakan implementasi transaksi non tunai yang tertuang dalam Peraturan Bupati No.23 Tahun 2021 diharapkan bisa menjadi pedoman dan panduan pelaksanaan transaksi non tunai bagi pihak-pihak terkait di Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri terutama di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian terkait implementasi sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Kediri, dengan judul : **“Implementasi Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dikemukakan bahwa penelitian ini memfokuskan pada implementasi sistem transaksi non tunai yang merupakan bagian dalam proses pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri.

## **C. Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana proses Implementasi Sistem Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri?

- 2) Bagaimana keuntungan dan kendala dalam proses Implementasi Sistem Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri?

#### **D. Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui proses Implementasi Sistem Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri.
- 2) Untuk mengetahui keuntungan dan kendala yang dihadapi dalam proses Implementasi Sistem Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Suatu Penelitian pasti memiliki manfaat, baik itu pada penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Sesuai dengan judul penelitian ini yang menggunakan metode kualitatif maka manfaat penelitian ini bersifat teoritis dan praktis, adapun manfaat penelitian sesuai judul :

##### 1) Manfaat Teoritis

###### a. Bagi Akademisi

Manfaat penelitian ini dapat menjadi bahan suatu kajian dan informasi pada bidang akademik terutama ilmu akuntansi pemerintah dan bisa menjadi sumber ilmu pengetahuan seperti beberapa konsep atau teori yang mengkaji implementasi sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah.

b. Bagi Peneliti

Sebagai acuan dalam menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman penelitian mengenai implementasi sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah yang berguna untuk masa yang akan datang.

2) Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini dapat memberikan pertimbangan masukan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri dalam pengembangan sistem transaksi non tunai supaya semakin baik dan tertata pada penerapannya dan mampu memberikan gambaran kepada masyarakat secara luas untuk memahami pentingnya implementasi sistem transaksi non tunai yang merupakan sistem baru dalam pengelolaan keuangan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, H. (2012). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.
- Abdul, H., & Syam, K. (2012). Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi. Jakarta : Salemba Empat.
- Adam, A. K., Toddy, A., & Dini, A. R. (2021). Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Belanja Langsung. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 115–124. <https://doi.org/10.17509/jrak.v9i1.29294>
- Baldric, S. (2015). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Chabib, S., & Heru, R. (2010). Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Bandung : Fokusmedia.
- Dr. Rachmat, M. S. (2010). Akuntansi Pemerintahan (Cetakan I). Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Elmizar, & Kasmadi. (2020). Analisis Implementasi Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar). *Jurnal Riset Manajemen Indonesia*, 2(3), 149–157.
- Febrian, B., & Putriana, V. T. (2021). Evaluasi Implementasi Kebijakan Transaksi Non-Tunai dalam Konteks Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Kasus di Kota Solok-Sumatera Barat. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(1), 86–95. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i1.1230>
- Haryono, & Abridinata Jering, O. (2020). Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Kabupaten Landak. *Jaakfe*, 10(2).

- Lailatur, R., & Dian, F. (2022). Analisis Penerapan Asas Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Di Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmu Sosial*, 1(1).
- Manullang, Y. M. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan BRIZZI Bank Rakyat Indonesia di Kota Pekanbaru.
- Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021. Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri
- Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai. 17 April 2017. Jakarta